

# MODEL KESESUAIAN IMPLEMENTASI PROGRAM JUT DAN JAPRO DALAM PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BATU

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

MAULIDINA AINUR ROSIDA

217.01.09.1.043



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021



#### RINGKASAN

Maulidina Ainur Rosida, 2020, NPM 21701091043, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Model Kesesuaian Implementasi Program Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu Melalui JUT dan Japro. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II : Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int, 102 Hal + xix

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunya sektor pertanian di Kota Batu pada tahun 2015-2017 dan lemahnya infrastruktur baik fisik dan non fisik dalam sektor pertanian. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertaniam mengeluarkan kebijakan publik bentuk program JUT dan Japro untuk menunjang dan memperlancar kegiatan dibidang pertanian dalam bentuk infrastruktur berupa jalan pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi program JUT dan japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kesamaan antara model implementasi program JUT dan Japro dengan teori Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten, yakni adanya kesesuaian ketiga elemen tersebut yang diantaranya Program JUT dan Japro, Dinas Pertanian, dan petani/gapoktan/ masyarakat sama-sama saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.

Faktor pendukung dalam implementasi JUT dan Japro di Kota Batu ialah adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang berbentuk gotong royong, tenaga, hingga adanya dana hibah berupa lahan dan adanya usulan dari masyarakat khusunya kelompok tani untuk dibuatkan jalan pertanian guna memperlancar kegiatan usaha tani mereka. Sedangkan, faktor penghambatnya ialah adanya institusi lain yang ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur bentuk jalan, sehingga membuat perkembangan program JUT dan Japro menurun dari segi kuantitas.

Kata kunci : JUT, Japro, implementasi program, model kesesuaian implementasi David C. Korten



#### **SUMMARY**

Maulidina Ainur Rosida, 2020, NPM 21701091043, Public Administration Major Faculty of Administrative Science University of Islam Malang., Suitability Model of Program Implementation in Increasing the Agricultural Sector in Batu City through JUT and Japro. Supervisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Supervisor II: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int 102 Hal + xix

The research was based of an issue or phenomenon regarding the decline in the agricultural sector in Batu City on 2015-2017 and the weak infrastructure, physical and non-physical in the agricultural sector. Therefore, to overcome it, the Agriculture Agency issued a public policy in the form of JUT and Japro programs to support and expedite activities in the agricultural sector in the form of infrastructure in the form of agricultural roads.

The research focuses on the problem how the implementation model of JUT and Japro programs in improving the agricultural sector in Batu City and the factors that influence the implementation of these programs. research uses the , descriptive-qualitative method. The data collection is conducted using interviews, observation, and documentation.

The results showed that there are similarities between the JUT and Japro program implementation models with David C. Korten's Program Implementation Conformity Model theory, namely the compatibility of these three elements, including the JUT and Japro Programs, the Agricultural Service, and farmers / Gapoktan / community together. related to and influencing the successful implementation of the program.

Beside that, there are supporting factors in the implementation of JUT and Japro in Batu City are the existence of community participation and community awareness in the form of mutual cooperation, labor, to the existence of grants in the form of land and the existence of proposals from the community, especially farmer groups, to make agricultural roads to facilitate their farming activities. Meanwhile, the inhibiting factor is the existence of other institutions that play a role in building infrastructure in the form of roads, thus causing the development of JUT and Japro programs to decline in terms of quantity.

**Keyword : JUT, Japro, program implementation, implementation model by David C. Korten** 



#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) yang biasanya dikenal sebagai jalan pertanian merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dibutuhkan dalam sektor pertanian khususnya dalam mendukung kegiatan agribisnis (Daulay, 2019). Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) adalah bentuk dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan prasarana transportasi di kawasan pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) yang berfungsi untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat penampungan, tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, pemukiman, ataupun pasar (Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2013).

Di Indonesia, Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi disebutkan dalam UU 2013 Pasal 16 Nomor 19 Tahun dijelaskan bahwa bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengelola prasarana pertanian ialah Pemerintah dan Daerah melalui Kemeterian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah juga berperan untuk membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas. Selain itu, dijelaskan juga pada undang-undang ini bahwa Pemerintah dapat memberikan subsidi berupa



benih, bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.

Berbicara mengenai kebijakan publik terutama pada peningkatan sektor pertanian, peneliti memberikan perhatian yang besar pada peningkatan pertanian khususnya di Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota yang memiliki potensi utama di sektor pertanian. Pertanian di Kota Batu didominasi oleh pertanian hortikultura, sedangkan pertanian untuk tanaman pangan kurang dominasi (Statistika Daerah Kota Batu 2018).

Pada peningkatan sektor pertanian di Kota Batu tentunya banyak mengalami hambatan. Adapun lima masalah pada sektor pertanian di Kota Batu, pertama ialah Kota Batu sering dihadapkan pada ancaman perubahan iklim, adanya perubahan iklim tersebut menimbulkan bergesernya musim tanam, perubahan keanekargaman penyakit dan hama tanaman, hal ini berdampak pada penurunan produksi panen (ketersediaan pangan) dan mengancam usaha tani. Kedua lahan pertanian berkurang dikarenakan terdapat tingginya alih fungsi lahan. Ketiga berkurangnya sumber daya manusia dalam sektor pertanian, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang mengubah pola pikirnya dikarenakan Kota Batu berubah menjadi Kota Wisata yang disebut Kota Wisata Batu (KWB) dan kini banyak masyarakat yang mulai beralih menjadi pelaku usaha wisata. Keempat terdapat masalah pada pelaksanaan program pertanian berkelanjutan yakni pertanian yang berbasis organik yang belum terlaksana dengan baik (malangtimes.com).

Kelima sarana produksi (saprodi) yang kurang memadai seperti beberapa akses jalan dan lemahnya infrastruktur baik fisik dan non fisik.

Maka dari itu, lima masalah yang terjadi di Kota Batu tersebut membutuhkan perhatian dan upaya yang ekstra dari pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah ini, khususnya Dinas Pertanian perlu berupaya untuk melakukan pemetaan, mengenali serta mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh petani dan bersama-sama mengusahakan akan jalan keluarnya (solusi) untuk digunakan merumuskan suatu perencanaan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Bentuk perencanaan tersebut dituangkan dalan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2017-2022 yang berlandaskan dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2017-2022. (Sumber: LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun Anggaran 2018)

Untuk mengatasi isu-isu atau masalah-masalah tersebut, Pemerintah Kota khususnya Dinas Pertanian juga sudah melakukan berbagai upaya dengan cara membuat kebijakan atau program untuk membangun sektor pertanian di Kota Batu. Adapun cara-cara yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk mengatasi masalah tersebut ialah Dinas Pertanian memfokuskan pada lima program prioritas (malangtimes.com). Program-program tersebut ialah dengan pengadaan sarana produksi (saprodi) pada sektor pertanian, memantapkan pasar hasil pertanian, meningkatkan SDM pertanian dengan memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang



pertanian, meningkatkan dan mengembangkan pertanian organik, dan modernisasi alat-alat pertanian seperti alat untuk mengolah tanah, penyiraman, hingga panen.

Adapun masalah yang ingin peneliti jadikan fokus dan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah analisis kebijakan publik atas masalah sarana produksi (saprodi) dan lemahnya infrastruktur baik fisik maupun non fisik pada sektor pertanian di Kota Batu, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan publik untuk peningkatan sektor pertanian di Kota Batu dengan mencanangkan Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro). Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) merupakan program kegiatan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian untuk menunjang dan memperlancar kegiatan dibidang pertanian, seperti halnya sarana produksi, alat angkut hasil panen pertanian, baik tanaman pangan maupun hotikultural yang ada di Kota Batu (timesindonesia.co.id).

Pembangunan jalan pertanian di lingkungan persawahan dan perkebunan milik masyarakat di Kota Batu telah dimulai sejak tahun 2018 didanai oleh APBD dan DAK yang disiapkan setiap tahunnnya untuk membantu petani Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) ini diawali dari proses Musrenbang, yang dilanjutkan dengan pengajuan proposal oleh Gabungan Kelompok Tani (timesindonesia.co.id).



Seperti yang dilansir malangtimes.com pada pembangunan jalan pertanian di Kota Batu ini, Dinas Pertanian Kota Batu memastikan akan ada tujuh titik jalan yang biasanya menjadi akses para petani pasca produksi yang nanti kondisinya akan dijadikan lebih layak. Maka dari itu, Dinas Pertanian Kota Batu sudah menentukan bahwa program Jalan Usaha Tani (JUT) secara fungsi utama akan dibangun di areal persawahan tanaman pangan, yang akan diimplementasikan di tiga titik wilayah Kota Batu yakni di kawasan Desa Pendem, Desa Pandanrejo dan Kelurahan Temas. Sedangkan program Jaringan Produksi (Japro) dipergunakan di areal persawahan sayuran dan buah-buahan (komoditi hortikultural), yang akan dilaksankan di empat titik yakni Desa Sumber Berantas, Desa Tlekung, Desa Torongrejo dan Desa Punten.

Untuk pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Kota Batu ini di masing-masing titik tersebut akan dibangun jalan makadam kurang lebih sepanjang 200 hingga 300 meter dengan lebar sekitar 2,5 meter hingga 3 meter (malangtimes.com). Hal ini juga ditekankan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kota Batu Hendry Suseno pada hasil wawancara yang dilansir malangtimes.com bahwa untuk spesifikasi pembangunan jalan pertanian ini akan disesusaikan pada kondisi jalan di areal perswahannya atau kondisi jalan daerah tersebut dan satu titik jalan kurang lebih akan menghabiskan anggaran sebanyak 170-200 juta. Hasil evaluasi pembangunan jalan pertanian ini juga dinilai mempermudah akses, efisiensi, waktu dan tenaga serta Dinas Pertanian menargetkan tahun 2022 semua ruas atau titik jalan pertanian sudah tersentuh.



Maka dari itu, untuk menganalisis implementasi program JUT dan Japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu, peneliti menemukan bahwa tahun 2018 sebagian besar tanaman pangan dan hotikultura mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tanaman padi, jagung, jeruk dan mawar. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti sediakan dengan mengambil beberapa sample tanaman hortikultural yang banyak diusahakan di Kota Batu yakni buah apel, buah jeruk dan bunga mawar, dan untuk tanaman pangan ialah padi, jagung, dan ubi.

Tabel 1.1 Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hotikultura Kota Batu Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman Pangan					
Padi (ton)	4.863	4.505	2.905	7.106	5.031
Jagung (ton)	1.114	1.104	884	1.584	667,35
Ubi (ton)	869	1.057	1.104	504	327,66
Tanaman Hotikultura					
Apel (ton)	67.120,7	54.126,6	55.891,9	54.532	50.525
Jeruk (ton)	13.223,1	14.152,3	18.704,5	22.217,7	23.844
Mawar (tangkai)	95.698.371	99.586.510	96.944.900	101.134.739	116.053.650

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan mengkaji salah satu program hasil dari kebijakan publik dengan judul : "Model Kesesuaian Implementasi



Program JUT dan Japro dalam Peningkatan Sektor Pertanian Kota Batu"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskann beberapa rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, yakni:

- Bagaimana model kesesuaian implementasi program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu?

# C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana model kesesuaian implementasi kebijakan pada program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dari kebijakan publik pada program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPRO), baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam upaya membangun sektor pertanian di Kota Batu.



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

## a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang analisis kebijakan publik peningkatan pada sektor pertanian di Indonesia khususnya di Kota Batu. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian sejenis.

## b. Secara Praktik

Penelitian ini diharapakan dan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat maupun Pemerintah Kota Batu. Masukan bagi masyarakat bisa berupa rekomendasi partisipasi masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam mendukung program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam upaya peningkatan sektor pertanian di Kota Batu. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dijadikan evaluasi atau gambaran bagi Pemerintah Kota Batu terhadap implementasi (pelaksanaan) kebijakan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu.



#### BAB V

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa peran Dinas Pertanian terhadap implementasi program JUT dan Japro di Kota Batu sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya titik jalan yang sudah tersentuh program JUT dan Japro sehingga pelaksanaan program pembangunan JUT dan Japro dari tahun ketahun makin berkurang.
- b. Terdapat kesamaan antara model implementasi program JUT dan Japro dengan teori Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten, yakni adanya kesesuaian ketiga elemen tersebut yang diantaranya Program JUT dan Japro, Dinas Pertanian, dan petani/ gapoktan/ masyarakat sama-sama saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.
- kesesuaian Program JUT dan Japro dengan Dinas Pertanian yaitu kesesuaian antara tugas akan isi program tersebut dengan kemampuan Dinas Pertanian sebagai pelaksana yang mana dalam pengimplementasian program tersebut berdasar pada Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani Tahun 2018 oleh Kementan. Sedangkan, kesesuaian antara program JUT dan Japro dan pemanfaat (Petani, Gapoktan, Masyarakat) yaitu kesesuaian antara apa yang akan



ditawarkan oleh program tersebut melalui apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yakni untuk memperlancar aksesbilitas kegiatan agribisnis dan diharapkan dapat meningkatkan sektor pertanian.

- d. Kesesuaian antara Dinas Pertanian dengan program JUT dan Japro ialah kemampuan Dinas Pertanian Kota Batu sebagai pelaksana dengan isi program tersebut yang dibuktikan dengan banyaknya jalan yang sudah disentuh oleh Program JUT dan Japro pada tahun 2018, yakni JUT sebanyak 6 titik dan Japro sebanyak 8 titik. Sedangkan, kesesuaian antara Dinas Pertanian (organisasi pelaksana) dengan pemanfaat yaitu kesesuaian yang berkaitan dengan syarat yang diputuskan oleh organisasi atau aparat guna memperoleh hasil program dengan apa yang dilakukan oleh sasaran program dibuktikan adanya standar teknis dan kriteria lokasi yang ditentukan Disperta yakni mempunyai lebar minimal 2 m dan dinilai dapat memperlancar aksesbilitas usaha tani.
- e. Kesesuaian antara pemanfaat (Petani, Gapoktan, Masyarakat) dan Dinas Pertanian ialah adanya tuntutan dan kebutuhan atau dorongan dari masyarakat untuk memperoleh hasil program tersebut yang dibuktikan dengan adanya tuntutan berbentuk usulan dari pemanfaat melalui proses musrembang. Sedangkan, kesesuaian antara Pemanfaat (Petani/ Kelompok Tani/ Masyarakat) dengan Program JUT-Japro ialah adanya kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan pemanfaat, yakni para petani/kelompok tani/ masyarakat ialah merasa dipermudah dalam hal



- aksesbilitas kegiatan usaha tani dan diharapkan berdampak pada peningkatan sektor pertanian di Kota Batu.
- f. Adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori model kesesuian David C. Korten diantaranya ialah kesesuaian antara program JUT dan Japro dengan organisasi pelaksana (Dinas Pertanian) yakni perihal isi dan tugas program diantaranya pada pelaksanaan pencairan anggaran dan metode pelaksanaan.
- g. Adanya ketidaksesuaian antara para pemanfaat (petani/kelompok tani/masyarakat) dengan Dinas Pertanian yakni tentang hampir tidak adanya dorongan atau tuntutan dari masyarakat baik petani maupun kelompok tani yang mana dirasa kesadaran masyarakat khususnya petani di Kota Batu pentingnya infrastruktur kurang
- h. Faktor Pendukung implementasi program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat yang beebentuk gotong royong, tenaga, hingga adanya dana hibah berupa lahan jika terdapat pelebaran jalan guna memenuhi standar teknis. Sedangkan, kesadaran masyarakat berbentuk dalam wujud usulan dari masyarakat khususnya para petani, kelompok tani untuk dibuatkan jalan pertanian guna memperlancar kegiatan usaha tani mereka.
- i. Faktor Penghambat implementasi program JUT dan Japro ialah dikarenakan hampir tidak adanya lahan yang tersedia lagi untuk dijadikan program JUT dan Japro. Permasalahan tersebut muncul akibat banyaknya



pariwisata di Kota Batu dari tahun ke tahun, banyaknya pembangunan perumahan atau PUPR yang masuk kelahan pertanian, dan tersedianya anggaran desa yang menjadikan perkembangan program JUT dan Japro menurun dari segi kuantitas (jumlah).

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan publik khususnya dalam program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) harus dilakukan sebaik dan seoptimal mungkin, guna memenuhi sasaran program yakni menyediakan kebutuhan masyarkat. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

- Penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat (kelompok target)
   oleh Pemerintah terkait (Dinas Pertanian Kota Batu) perlu ditingkatkan
   baik frekuensi maupun jangkauannya.
- 2. Koordinasi antara komisi pengawas dan komisi pelaksana perlu ditingkatkan lagi, agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Selain itu koordinasi antara kelompok masyarakat hingga desa juga perlu untuk mengetahui kondisi lokasi yang akan dibangun terdapat perubahan atau tidak, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian untuk melanjutkan ketahap pelaksanaan.
- 3. Masyarakat harus lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan baik dalam organisasi maupun perkumpulan yang diadakan oleh pihak pemerintah agar lebih paham secara luas tentang adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah khususnya Kota Batu.



- 4. Masyarakat harus lebih ditingkatkan kesadaranya tentang akan kebutuhan mereka dan mengetahui apa saja output serta manfaat yang akan didapat dari adanya kebijakan publik ini, khususnya program Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi di Kota Batu.
- 5. Selain partisipasi dan kesadaran dari masyarakat harus dari sendiri, pemerintah khususnya Dinas Pertanian melalui program ini dapat berperan sebagai perantara untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yakni dengan cara melaksanakan program dengan metode swakelola berdasarkan Pedoman Kementan.
- 6. Perlu adanya penelitian lanjutan, penelitian ini masih didasarkan pada hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan dengan waktu yang terbatas sehingga masih terdapat kelemahan. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro).



#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Sumber Buku

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:* Perspektif, Model dan Kriteria Pengukuran. Jurnal Kebijakan Publik.
- Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Batu, D. P. (2018). LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun Anggaran 2018. Kota Batu.
- Hadiutomo, K. (2019). *MEMBANGUN KAWASAN PERSWAHAN PADI MODERN "Solusi Ketahanan Pangan Ke Depan"*. Bogor: IPB Press.
- Hartati, S., & Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun Anggaran 2018
- Manila, I. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moloeng, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Moloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nonci, N. (2017). Impelementasi Program Gemas Kakao: Studi Kebijakan Program Gemas Kakao Kabupaten Luwu. Makassar: CV SAH MEDIA.



Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian TA.2013, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian, 2013

Robert, R. (1984). Rancangan Kebijakan Sosial. Jakarta: Rajawali.

Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatam.

Siagan, S. (2006). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Statistika Daerah Kota Batu 2015

Statistika Daerah Kota Batu 2016

Statistika Daerah Kota Batu 2017

Statistika Daerah Kota Batu 2018

Statistika Daerah Kota Batu 2019

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, & Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Pangan Kabupaten Rembang). Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Suryana. (2009). Pengaruh Corporate Governance Asset dan Growth terhadap Kinerja Pasar. Jakarta: Universitas Gunadarma.



#### **Sumber Jurnal**

Daulay, A. R. (2019). Analisis Kriteria dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian di Provinsi Jambi. *TEKNOTAN*, *Vol 13*. *No 1*.

Suminar, R. E. (2018). Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Plano Madani*, Volume 7 Nomor 1 hal 81-88.

# **Sumber Skripsi**

Rusmantika, K. (2017). Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Tentang Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kalimendong Kabupaten Wonosobo. *Skripsi : Universitas Diponegoro*.

# **Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2017-2022

\*\*\*\*

UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

#### **Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik Kota Batu,

https://batukota.bps.go.id/ (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)

Dinas Pertanian Kota Batu kembangkan JUT dan Japro, times indonesia, 2019, Muhammad Dhani Rahman,

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/218761/dinas-pertanian-kota-batukembangkan-jut-dan-japro (diakses pada tanggal 07 Oktober 2020)

Perlancar Akses Jalan Pertanian di Kota Batu, Pemkot Programkan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi, Irsya Richa, 2019, malangtimes.com <a href="https://www.malangtimes.com/baca/41668/20190715/194100/perlancar-akses-">https://www.malangtimes.com/baca/41668/20190715/194100/perlancar-akses-</a>



<u>jalan-pertanian-di-kota-batu-pemkot-programkan-jalan-usaha-tani-dan-jalan-produksi</u> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)

Sukseskan 5 Program, 2020 Pertanian Kota Batu Digelontor Rp 20 Miliar, Irsya Richa,malangtimes.com

https://www.malangtimes.com/baca/48359/20200125/123200/sukseskan-5program-2020-pertanian-kota-batu-digelontor-rp-20-miliar (diakses pada tanggal 07 Oktober 2020)

Tahun ini, Kementan Bangun Jalan Usaha Tani di 10 Provinsi, suara.com, Fabiola Febrinastri, 2020

https://www.suara.com/bisnis/2020/04/04/133330/tahun-ini-kementan-bangun-jalan-usaha-tani-di-10-provinsi?page=all (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)

